

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN  
KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA**

**IMPACT EVALUATION OF THE ACCELERATION PROGRAM FOR THE  
ERADICATION OF EXTREME POVERTY IN INDONESIA**

**Arif Sujoko**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia menghadapi perlambatan penurunan kemiskinan ekstrem sehingga berusaha mempercepatnya melalui Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Program Tahap I). Evaluasi dampak Program ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak Program dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Teori perubahan yang digunakan menjelaskan bahwa bantuan sosial pada Program Tahap I akan meningkatkan konsumsi penduduk miskin ekstrem sehingga bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan metode *difference in difference*, penelitian ini menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi Program, tetapi penurunan tersebut secara statistik tidak signifikan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Program Tahap I tidak berdampak dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan nilai bantuan yang diterima sebagian penduduk miskin ekstrem lebih kecil dibanding *poverty gap*-nya. Penelitian ini menyarankan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut guna mengevaluasi dampak program secara lebih komprehensif (Program Tahap I-III), menyediakan data sasaran yang akurat, dan memberikan bantuan sosial sesuai *poverty gap*.

**Kata kunci:** kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, evaluasi dampak, *difference in difference*

**ABSTRACT**

*The Indonesian Government faced a slowdown in the reduction of extreme poverty and tried to accelerate it by the Program for the Eradication of Extreme Poverty (Program in 1<sup>st</sup> Phase). Impact evaluation of the Program was still limited. Therefore, this study aimed to evaluate the impact of the Program accelerating the reduction of extreme poverty. The theory of change used explained that social assistance on Program in 1<sup>st</sup> Phase would increase the consumption of the extreme poor so that they could escape extreme poverty. Using the difference in difference method, this study showed that there was a decrease in extreme poverty in the Program locations. However, this decrease was not statistically significant. Therefore, this study concludes that the Program in 1<sup>st</sup>*

*Phase did not impact accelerating the reduction of extreme poverty. This was likely because of social assistance that was not on target and the value of social assistance received by some of the extreme poor was smaller than the poverty gap. This study recommends conducting further research to evaluate the impact of program more comprehensively (Program in 1<sup>st</sup>-3<sup>rd</sup> Phase), provide accurate targeting data, and provide social assistance according to the poverty gap.*

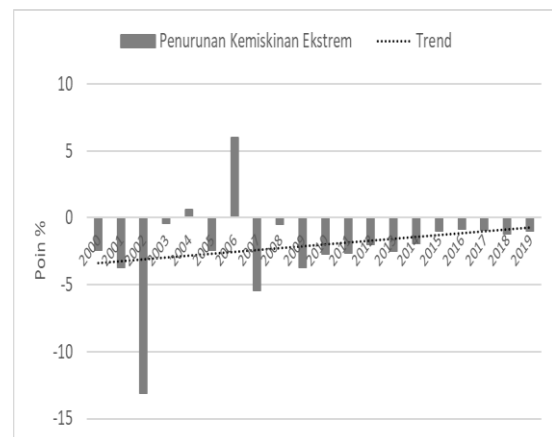
**Keywords:** extreme poverty, social assistance, impact evaluation, difference in difference

## A. Pendahuluan

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem di semua negara paling lambat tahun 2030. (UN, 2015)

Walaupun sudah menjadi target SDGs sejak 2015, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi atau kebijakan khusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Bahkan, Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak mencantumkan istilah kemiskinan ekstrem.

Sebelum terdapat kebijakan khusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, data menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mengalami penurunan sebagaimana pada gambar 1. Permasalahannya, penurunan tersebut memiliki *trend* yang makin lambat. Hal ini bisa menjadi kendala dalam mewujudkan target SDGs, bebas dari kemiskinan ekstrem.



**Gambar 1.** Trend penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia makin melambat (diolah dari UN Data, 2023)

Di tengah perlambatan laju penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, pada tahun 2020, Pemerintah mulai menjadikan kemiskinan ekstrem sebagai isu prioritas. Pada Rapat Terbatas Strategi Pengentasan Kemiskinan 4 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan target baru dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu 0% pada tahun 2024.

Pemerintah tidak menetapkan target tahunan untuk mewujudkan target akhir 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tersebut. Akan tetapi, dengan asumsi bahwa kemiskinan ekstrem akan turun secara linier, maka target 2020-2024 dapat diproyeksikan sebagaimana tabel 1.

**Tabel 1.** Proyeksi Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

| Tahun | Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem (%) |
|-------|---|
| 2020  | 3,52                                    |
| 2021  | 2,64                                    |
| 2022  | 1,76                                    |
| 2023  | 0,88                                    |
| 2024  | 0,00                                    |

Walaupun percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sudah menjadi isu prioritas sejak tahun 2020, intervensi kebijakannya baru diputuskan pada tahun 2021. Dalam rapat terbatas 21 Juli 2021, Pemerintah mengagendakan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahap I (Program Tahap I). Sebagai *pilot project*, Program Tahap I dilaksanakan di wilayah dengan permasalahan kemiskinan ekstrem yang tinggi, yaitu 35 kabupaten di 7 provinsi prioritas. Dalam rapat yang sama, ditetapkan bahwa Program Tahap I harus dilaksanakan sebelum akhir 2021. (Adji *et al.*, 2022a).

Tiga tahun setelah program Tahap I selesai, belum ditemukan penelitian evaluasi dampak (*impact evaluation*) untuk menilai efektivitas Program Tahap I secara keseluruhan. Penelitian yang ada pasca selesainya Program Tahap I bersifat penelitian implementasi, misalnya: penelitian strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Madiun (Wisnutama *et al.*, 2023). Penelitian lain bersifat deskriptif menggambarkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem di Kota Medan (Harahap, 2023). Penelitian deskriptif lainnya dilakukan oleh Agustina *et al.* (2023), yaitu mengenai upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya. Ketiga penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif.

Oleh karena belum diketahuinya efektivitas Program Tahap I dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan penelitian evaluasi dampak Program Tahap I. Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan *counterfactual impact evaluation*. Sedangkan penelitian dalam tema sejenis sebagaimana diuraikan di atas menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Pendekatan *counterfactual impact evaluation*, tidak membandingkan target dengan realisasi penurunan kemiskinan ekstrem. Tetapi, yang dibandingkan adalah penurunan kemiskinan ekstrem ketika terdapat Program Tahap I dengan penurunan kemiskinan ekstrem ketika tidak terdapat Program Tahap I di waktu yang sama.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Gap Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sebelum menjadi isu prioritas pada tahun 2020, kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mengalami penurunan. Akan tetapi, *trend* penurunannya makin lambat sehingga bisa menghambat pencapaian target SDGs.

Dalam kondisi perlambatan penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, Pemerintah memutuskan *pilot project* melalui Program Tahap I pada akhir 2021. Dengan melaksanakan Program Tahap I, Pemerintah berharap penurunan kemiskinan ekstrem bisa berjalan lebih cepat, khususnya di 35 kabupaten lokasi Program.

Walaupun Program Tahap I

merupakan langkah strategis pertama yang secara khusus bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, penelitian efektivitas Program Tahap I relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian evaluasi dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak (efektivitas) Program Tahap I. Program Tahap I dinyatakan berdampak jika penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I lebih cepat dibanding *counterfactualnya*.

Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitiannya adalah “*apakah Program Tahap I berdampak dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem?*” Untuk memberikan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian tersebut, dihipotesiskan bahwa Program Tahap I berdampak dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

## **2. Konsep Kemiskinan dan Garis Kemiskinan**

Dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan didefinisikan sebagai hal miskin, keadaan miskin, yaitu keadaan tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).

Definisi lain diberikan *Encyclopaedia Britannica*. Menurutnya, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki sejumlah uang atau harta benda sebagaimana lazimnya atau pantas secara sosial. Adapun Bush (2015) dalam *The Encyclopedia of Political Thought* mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan yang ditandai dengan deprivasi dan standar hidup yang rendah.

Berdasarkan definisi di atas, konsep kemiskinan dapat dimaknai sebagai ketiadaan uang atau harta. Walaupun konsep “ketiadaan uang atau harta” hanya salah satu konsep “ketiadaan” dalam diskursus kemiskinan, konsep ini digunakan oleh banyak negara

untuk mengukur kemiskinan dengan merujuk pada tingkat pendapatan tertentu sebagai garis kemiskinan (Bush, 2015). Seseorang dinyatakan miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan.

Dalam praktiknya, pendapatan kurang reliabel untuk diukur, sehingga garis kemiskinan ditentukan berdasarkan proksi pendapatan, yaitu konsumsi. Oleh karena itu, konsep kemiskinan pendapatan (*income poverty*) didekati dengan konsep kemiskinan konsumsi (*consumption poverty*). (Chambers, 2006)

Kemiskinan konsumsi diukur dengan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dalam hal ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Pada Maret 2024, secara nasional garis kemiskinan adalah Rp582.932 per kapita per bulan (BPS, 2024).

## **3. Konsep Kemiskinan Ekstrem**

Metode pengukuran kemiskinan yang sama digunakan untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Perbedaannya terletak pada nilai garis kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan garis kemiskinan ekstrem sebesar \$1,9 perkapita perhari (Rosser, 2021). Akan tetapi, pada September 2022, garis kemiskinan ekstrem \$1,9 ini diubah menjadi \$2,15 per kapita per hari (Hasell, 2022).

Mata uang \$ yang digunakan untuk garis kemiskinan ekstrem adalah mata uang \$ internasional, yaitu mata uang

hipotesis yang telah disesuaikan dengan inflasi dari waktu ke waktu dalam satu negara dan perbedaan biaya hidup antar negara. Penggunaan mata uang \$ internasional bertujuan menyediakan unit yang memiliki daya beli tetap dari waktu ke waktu dan lintas negara. Dalam hal ini, \$1 internasional dapat membeli barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang sama di mana pun dan kapanpun dibelanjakan. Untuk mengkonversi mata uang \$ internasional ke mata uang suatu negara, digunakan kurs yang disebut *Purchasing Power Parity* (PPP). (Hasell, 2022)

Pemerintah Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan ekstrem \$ 1,9. Angka ini dikonversi menggunakan kurs PPP dari Bank Dunia menjadi Rp10.739 per kapita per hari atau setara dengan Rp322.170 per kapita per bulan (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

#### **4. Program Tahap I Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Kebijakan pertama yang dirancang secara khusus untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Program Tahap I. Program ini dilaksanakan di 35 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Penduduk penerima Program Tahap I mendapat tambahan bantuan sosial berupa *top up* BLT Desa dan Program Sembako (Adji *et al.*, 2022a). BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19 (PMK

222/2020). Sementara itu, Program Sembako merupakan pengembangan dari BPNT dalam bentuk perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Dalam Program BPNT, pemerintah menyalurkan bantuan kepada KPM secara nontunai. Selanjutnya, KPM bisa membelanjakan ke e-Warong untuk membeli bahan pangan. (Permensos 5/2021).

Sasaran penerima tambahan BLT Desa dalam Program Tahap I adalah data riil penerima BLT Desa Januari 2021. Sementara itu, sasaran penerima *top up* Kartu Sembako adalah data *existing* penerima Kartu Sembako yang sudah difilter 10% terendah (Adji *et al.*, 2022b).

#### **5. Penelitian Terdahulu tentang BLT/UCT**

Bantuan sosial dalam bentuk BLT atau UCT dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 2005. Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk merespon kenaikan harga minyak dunia. Dengan adanya BLT, diharapkan penduduk miskin dapat mengimbangi kenaikan harga barang yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. (Kwon dan Kim, 2015)

Menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi 2004, Hastuti (2006) mengestimasi jika tidak ada BLT, kenaikan BBM akan meningkatkan kemiskinan dari sebelumnya 16,66% menjadi 22,05%. Akan tetapi, dengan adanya BLT, peningkatan kemiskinan bisa ditekan hanya menjadi 18,70%.

Analisis dampak sosial ekonomi dari Program BLT PKPS-BBM juga dilakukan oleh Widjaja (2012). Dalam penelitiannya, Widjaja (2012) menyimpulkan bahwa Program BLT PKPS-BBM dapat menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai akibat kenaikan BBM.

Yusuf (2018) melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis dampak BLT terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) terhadap ekonomi Indonesia, didapatkan temuan bahwa BLT mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Golan *et al.* (2017) melakukan penelitian terkait UCT di China, yaitu Program Dibao. Program tersebut merupakan pemberian UCT untuk menjamin terpenuhinya standar hidup minimal. Dengan menganalisis data survei rumah tangga dari *China Household Income Project* dan data administratif dari *Ministry of Civil Affairs* untuk periode 2007-2009, disimpulkan bahwa UCT Program Dibao memberikan pendapatan yang cukup bagi keluarga miskin, tetapi secara substansial tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Ketidakefektifan dalam menurunkan kemiskinan ini disebabkan adanya kesalahan dalam penargetan sasaran penerima program.

Rwanda juga menjalankan program UCT sebagai bagian dari *the Vision 2020 Umerunge Program* (VUP). Dampak UCT VUP terhadap penurunan kemiskinan diteliti oleh Habimana *et al.* (2021). Analisis empiris yang dilakukan Habimana *et al.* (2021) menghasilkan temuan bahwa UCT VUP meningkatkan konsumsi penerima manfaat sebesar 3-5% dan mengurangi tingkat kemiskinan antara 5-7 poin persen.

## **6. Penelitian Terdahulu tentang BPNT/*Food Stamps***

Banerjee *et al.* (2021) melakukan penelitian eksperimental untuk mengetahui perbedaan dampak bantuan pangan dalam bentuk barang dan bantuan dalam bentuk *food stamps/voucher*/BPNT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan rumah tangga penerima BPNT yang berada pada kelompok 15%

terbawah, kemiskinannya turun sebesar 20%. Penurunan ini dicapai dengan biaya administrasi yang lebih rendah dibanding biaya administrasi untuk bantuan dalam bentuk barang.

Program sejenis dengan BPNT di Amerika Serikat dikenal sebagai Program *Food Stamps* yang kemudian berubah menjadi *the Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP* (Banerjee *et al.*, 2021). Dampak SNAP terhadap kemiskinan dianalisis oleh Wheaton dan Tran (2018). Analisis kedua peneliti atas data *Supplemental Poverty Measure* dari Biro Sensus menunjukkan dampak SNAP dalam menurunkan kemiskinan dari 15,4% turun menjadi 12,8%.

Sebelumnya, pada 2013, Tiehen *et al.* (2013) melakukan analisis atas data administratif dan survei. Penelitian tersebut menemukan dampak SNAP terhadap penurunan kemiskinan. SNAP juga dinyatakan sebagai program anti kemiskinan untuk nonlansia yang paling efektif di Amerika Serikat. Bahkan, SNAP dinilai berkinerja sangat baik untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan sangat efektif untuk keluarga miskin yang memiliki anak.

Hasil yang agak berbeda ditunjukkan oleh Jolliffe *et al.* (2005). Dalam penelitian yang menggunakan data survei dari tahun 1998 sampai dengan 2001 dan fokus pada kemiskinan anak, Jolliffe *et al.* (2005) menunjukkan bahwa Program *Food Stamps* tidak cukup menurunkan tingkat kemiskinan pada anak. Akan tetapi, Program ini berhasil menurunkan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan secara signifikan pada penerima Program *Food Stamps*.

## **7. Teori Perubahan (*Theory of Change*) untuk Evaluasi Dampak Kebijakan**

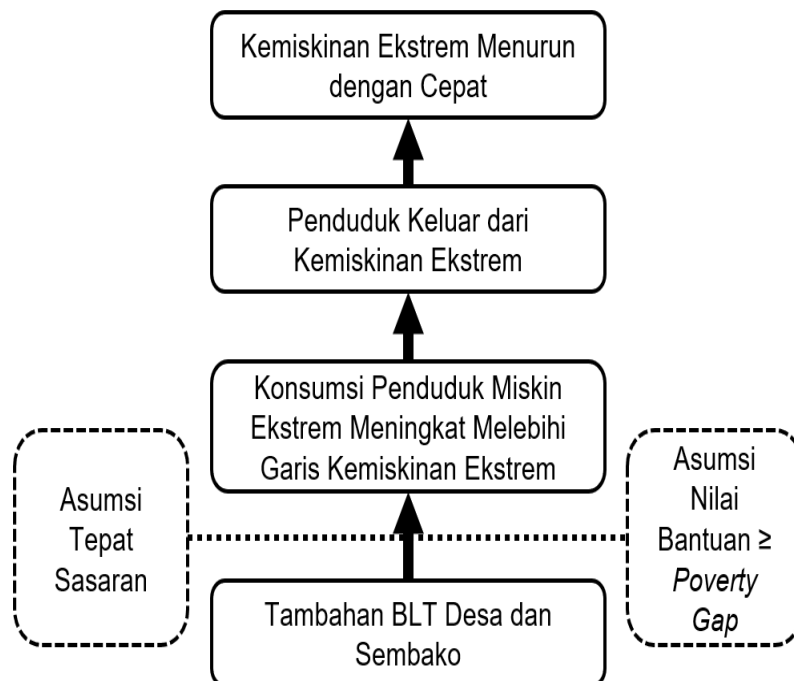
Berdasarkan hal-hal di atas, teori perubahan yang menjadi acuan kerangka

evaluasi secara konseptual adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengawali percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui Program Tahap I. Penduduk miskin ekstrem diberikan bantuan sosial berupa tambahan (*top up*) BLT Desa dan Program Sembako senilai masing-masing 300 ribu rupiah per bulan untuk setiap jenis bantuan.
- b. Bagi penduduk miskin ekstrem, kedua jenis bantuan sosial tersebut merupakan tambahan kemampuan finansial, baik secara tunai, maupun nontunai.
- c. Dengan asumsi bahwa kedua jenis bantuan hanya diterima oleh penduduk miskin ekstrem dan asumsi bahwa nilai bantuan lebih besar daripada *poverty gap* setiap individu, total konsumsi penduduk miskin ekstrem akan meningkat melebihi garis kemiskinan ekstrem.

- d. Apabila semua penduduk miskin ekstrem memiliki konsumsi di atas garis kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I berkurang lebih cepat.

Teori perubahan dari Program Tahap I (*top up* BLT dan Program Sembako) dengan dampak akhir (*ultimate outcome*) percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi Program tersebut selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan efektivitas BLT dan *Food Stamps* dalam menurunkan kemiskinan. Efektivitas BLT dinyatakan oleh Hastuti (2006), Yusuf (2018), dan Habimana *et al.* (2021). Sementara itu, efektivitas *Food Stamps* dikonfirmasi oleh Tiehen *et al.* (2013), Wheaton dan Tran (2018), dan Banerjee *et al.* (2021). Teori perubahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2.** Teori Perubahan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Teori perubahan ini digunakan sebagai kerangka logis evaluasi dampak kebijakan. Dalam hal ini, kebijakannya adalah tambahan BLT Desa dan tambahan Sembako, sedangkan dampaknya adalah kemiskinan ekstrem menurun dengan cepat di lokasi Program Tahap I

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, di mana proses penelitian dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahapan rasionalisme yang digunakan untuk menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah tahapan empirisme, untuk menguji hipotesis (Mantra, 2008).

Berdasarkan tipenya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang bersifat sumatif. Evaluasi dilakukan atas hasil (*ultimate outcome*) dari Program Tahap I. Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui dampak Program Tahap I dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian evaluatif ini adalah pendekatan kuasi eksperimen, yaitu *pretest-posttest comparison group (nonequivalent control group)*. Pendekatan ini dipilih karena penerima Program Tahap I tidak dipilih secara acak.

Pemerintah menentukan kabupaten penerima Program Tahap I dengan mempertimbangkan indeks kemiskinan ekstrem tertinggi dan dirancang untuk mewakili sekitar 20% penduduk miskin ekstrem dari total penduduk miskin ekstrem secara nasional (Adji *et al.*, 2022a). Dengan cara ini diperoleh 35 kabupaten penerima Program Tahap I yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai grup perlakuan.

Oleh karena dalam *pretest-posttest comparison group* ini tidak ada grup kontrol, sebagai gantinya digunakan grup

pembanding. Grup pembanding adalah kelompok kabupaten yang memiliki keserupaan karakteristik dengan grup perlakuan di semua aspek, kecuali satu hal saja, yaitu bahwa grup pembanding ini adalah kelompok yang tidak menerima Program Tahap I.

Apabila syarat grup pembanding tersebut bisa terpenuhi, perbandingan grup perlakuan dengan grup pembanding akan mendekati kondisi *ceteris paribus*. Perbandingan dalam kondisi *ceteris paribus* syarat untuk interpretasi hubungan sebab akibatnya (Angrist dan Pischke, 2015). Dalam hal ini, Program Tahap I merupakan sebab dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem merupakan akibat.

Untuk mendapatkan grup pembanding terbaik, digunakan *waiting list*, yaitu kabupaten yang menjadi lokasi Program Tahap II. Langbein dan Felbinger (2006) menjelaskan bahwa mereka yang berada pada *waiting list* memiliki inisiatif dan motivasi yang sama dengan mereka yang telah dipilih dalam grup perlakuan.

Seleksi tahap selanjutnya menggunakan kriteria berada pada 7 provinsi yang menjadi lokasi Program Tahap I. Kriteria ini mengasumsikan bahwa berbagai kebijakan tingkat provinsi yang memengaruhi grup perlakuan maupun grup pembanding adalah sama.

Seleksi tahap ketiga menggunakan kriteria tidak menjadi lokasi program tahap I. Berikutnya, seleksi terakhir dengan kriteria bukan berstatus kota karena lokasi Program Tahap I semuanya berstatus kabupaten. Hasil setiap tahapan seleksi disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2.** Kriteria Seleksi Bertahap untuk Mendapatkan Grup Pembanding

| Kriteria Pemilihan                              | Jumlah Terpilih    |
|---|--------------------|
| Lokasi program tahap II ( <i>waiting list</i> ) | 212 kabupaten/kota |
| Berada di provinsi lokasi tahap I               | 127 kabupaten/kota |
| Tidak menjadi lokasi program tahap I            | 92 kabupaten/kota  |
| Bukan berstatus kota                            | 83 kabupaten       |

Untuk mengevaluasi dampak Program Tahap I, digunakan metode *Difference in Difference* (DiD). DiD membandingkan perubahan *outcome* sebelum dengan setelah kebijakan antara grup perlakuan dengan *counterfactual*. Estimasi *counterfactual* menggunakan perubahan *outcome* di grup pembanding.

Jika ada dampak Program Tahap I, DiD akan menunjukkan dengan penurunan kemiskinan ekstrem yang lebih cepat di grup perlakuan dibandingkan *counterfactual*. Gertler *et al.* (2016) memberikan metode perhitungan DiD secara sederhana sebagaimana tabel 3.

**Tabel 3.** Skema Perhitungan DiD

| Group      | Before   | After | Diff. |
|------------|--|-------|-------|
| Perlakuan  | B  | A     | B - A |
| Pembanding | D  | C     | D - C |
| Perbedaan  | B - D  | A - C |       |
| DiD        | DiD = (B - A) - (D - C)<br>= (B - D) - (A - C) |       |       |

Sumber: Gertler *et al.* (2016)

Untuk menarik kesimpulan statistik dampak Program Tahap I, digunakan model linier. Dengan memperhatikan model DiD yang dispesifikasi oleh Angrist dan Pischke (2015), model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{dt} = \beta_0 + \beta_1 Treat_d + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treat_d \times Post_t) + e_{dt} \dots \dots (1)$$

di mana:

$Y_{dt}$  : Kemiskinan ekstrem di kabupaten ke-d pada waktu t sebelum atau sesudah Program Tahap I

$Treat_d$  : Variabel *dummy* untuk menggambarkan grup perlakuan, nilainya 1 untuk kabupaten penerima Program Tahap I dan 0 untuk kabupaten lain

$Post_t$  : Variabel *dummy* untuk menggambarkan periode setelah program Tahap I, nilainya 1 untuk periode setelah program Tahap I dan 0 untuk periode sebelum program Tahap I

$Treat_d \times Post_t$  : Variabel interaksi antara  $Treat_d$  dengan  $Post_t$

Koefisien  $\beta_3$  menunjukkan dampak kebijakan berdasarkan DiD. Kebijakan dinyatakan berdampak dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem jika koefisien  $\beta_3$  bernilai negatif. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang digunakan adalah:

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 < 0$$

$H_0$  secara statistik ditolak apabila  $p \text{ value} \leq \alpha$ . Jika  $H_0$  ditolak, artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa program tahap I berdampak dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Koefisien regresi pada model (1) diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS) dan *standar error* dihitung dengan metode *Heteroskedasticity Robust Standar Error*.

Variabel kemiskinan ekstrem dioperasionalkan dengan dua indikator, yaitu: tingkat kemiskinan ekstrem dan

jumlah penduduk miskin ekstrem. Oleh karena itu, evaluasi dampak digunakan untuk mengevaluasi:

1. Dampak program tahap I terhadap percepatan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,
2. Dampak program tahap I terhadap percepatan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem.

DiD dilakukan dengan asumsi adanya *paralel trend* sebelum Program Tahap I antara grup perlakuan dan grup pembandingan. Dalam hal ini, penurunan kemiskinan ekstrem dari tahun 2020 ke 2021 antara kedua grup harus memiliki *trend* yang sama. Untuk menguji terpenuhinya asumsi *paralel trend*, digunakan tes plasebo.

Penelitian ini menggunakan data kemiskinan ekstrem tahun 2021 (sebelum kebijakan) dan 2022 (setelah kebijakan) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (<https://p3ke.kemendikppm.go.id/sebaran>). Untuk data tahun 2020, bersumber dari publikasi TNP2K (Adji *et al.*, 2022a). Semua data miskin ekstrem tersebut bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret yang dilaksanakan oleh BPS.

Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (Agrawal, 2007; Sasmal dan Sasmal, 2016) dan indeks pembangunan manusia (Varlitya *et al.*, 2018; Rahmawati dan Sebayang, 2023). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pendugaan dampak kebijakan, model (1) ditambah dengan dua variabel kontrol, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (EG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga menjadi model berikut:

$$Y_{dt} = \beta_0 + \beta_1 Treat_d + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treat_d \times Post_t) + \beta_4 EG_{dt} + \beta_5 IPM_{dt} + e_{dt} \dots (2)$$

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Hasil tes plasebo menunjukkan asumsi *paralel trend* sebelum Program Tahap I dapat dipenuhi. Analisis statistik menghasilkan kesimpulan bahwa tidak tersedia cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan penurunan kemiskinan ekstrem dari tahun 2020 ke tahun 2021 di grup perlakuan dan grup pembandingan.

Oleh karena asumsi *paralel trend* dapat dipenuhi, evaluasi dampak kebijakan yang menggunakan DiD bisa dilakukan. Dalam hal ini, hasil analisis DiD tentang dampak Program Tahap I berdasarkan model 1 dan model 2 disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Analisis Regresi DiD Evaluasi Dampak Program Tahap I

| Model                                 | $\beta_3$ | p-value | Keterangan                                    |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|
| <b>Tingkat Kemiskinan Ekstrem</b>     |           |         |   |
| Model 1                               | -0,078    | 0,483   | Tidak signifikan pada taraf nyata $\alpha$ 5% |
| Model 2                               | -0,383    | 0,406   | Tidak signifikan pada taraf nyata $\alpha$ 5% |
| <b>Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem</b> |           |         |   |
| Model 1                               | -3.083    | 0,319   | Tidak signifikan pada taraf nyata $\alpha$ 5% |
| Model 2                               | -2.273    | 0,356   | Tidak signifikan pada taraf nyata $\alpha$ 5% |

Berdasarkan tabel 4, untuk indikator tingkat kemiskinan ekstrem, Model (1) menghasilkan nilai DiD -0,078. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem di grup

perlakuan lebih cepat daripada penurunan kemiskinan ekstrem di grup pembanding dengan selisih keduanya 0,078 poin persen. Akan tetapi, pengujian statistik menunjukkan bahwa DiD -0,078 tersebut tidak signifikan pada taraf nyata  $\alpha$  5%. Analisis menggunakan Model (2) juga menunjukkan hasil yang serupa. Walaupun *standar error* model (2) lebih kecil dibanding model (1), nilai DiD -0,383 secara statistik juga tidak signifikan pada taraf nyata  $\alpha$  5%.

Untuk variabel jumlah penduduk miskin ekstrem, kedua model menghasilkan DiD negatif. Model (1) DiD -3.083 dan model (2) DiD -2.273. Dengan DiD bernilai negatif sebenarnya mengindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di grup perlakuan lebih cepat dibanding grup pembanding. Akan tetapi, perbedaan penurunan kemiskinan ekstrem di antara kedua grup tersebut secara statistik tidak signifikan pada taraf nyata  $\alpha$  5%, baik berdasarkan model (1) maupun berdasarkan model (2) yang lebih efisien dengan *standar error* lebih kecil.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis model DiD di atas, tidak tersedia cukup bukti untuk menyatakan bahwa Program Tahap I berdampak dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I memang mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak lebih cepat dibanding penurunan jika tidak ada Program Tahap I. Dalam hal ini, tanpa adanya Program Tahap I, kemiskinan ekstrem tetap akan turun dengan kecepatan yang sama.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan dari Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) 2021 yang dilaksanakan oleh BPS. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan

pendekatan *counterfactual*, penilaian berdasarkan SEPBS pada prinsipnya menggunakan pendekatan *the pretest posttest (single group) design*. Oleh karena tidak memiliki *counterfactual*, hasil penilaian SEPBS tidak dapat digunakan untuk mengestimasi dampak penurunan kemiskinan ekstrem jika tidak ada Program Tahap I.

Dalam SEPBS tersebut, BPS membandingkan kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I berdasarkan data Susenas Maret 2021 (data sebelum kebijakan) dan data SEPBS Desember 2021 (data setelah kebijakan). Dari perbandingan kedua data tersebut diketahui bahwa angka kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I hanya turun 0,18 poin persen.

Selain itu, diperoleh informasi bahwa sebanyak 91,50% penduduk miskin ekstrem tetap berada dalam kemiskinan ekstrem setelah Program Tahap I selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, Adji *et al.* (2022b) menyatakan bahwa Program Tahap I dinilai kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan ekstrem.

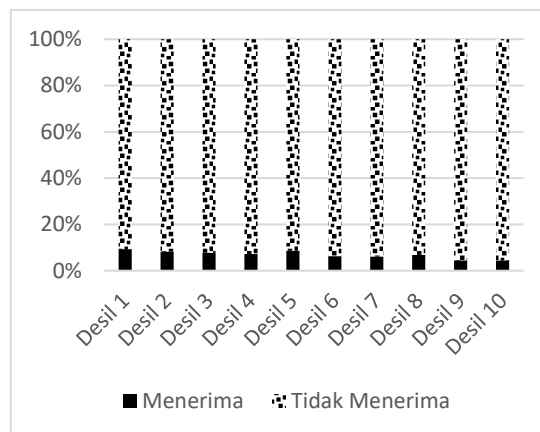
Tidak adanya dampak Program Tahap I juga menunjukkan bahwa tambahan (*top up*) BLT Desa dan Program Sembako tidak dapat mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I. Padahal, jika kedua bantuan sosial tersebut diterima oleh penduduk miskin ekstrem, menurut teori perubahan, akan meningkatkan total konsumsi penduduk miskin ekstrem di atas garis kemiskinan ekstrem, sehingga bisa mengeluarkan penerimanya dari kemiskinan ekstrem.

Efektivitas bantuan sosial dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menurut teori perubahan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa bantuan sosial disalurkan tepat sasaran. Artinya, bantuan hanya diterima oleh penduduk miskin ekstrem. Akan tetapi, jika asumsi tepat sasaran ini tidak dapat dipenuhi, di

mana kedua jenis bantuan sosial tersebut penyalurannya tidak tepat sasaran, efektivitasnya dalam penurunan kemiskinan ekstrem akan berkurang.

Kasus ketidakefektifan bantuan sosial karena penyaluran yang tidak tepat sasaran pernah terjadi dalam Program *Dibao* di China dan Program Sembako di Indonesia. Golan *et al.* (2017) menyatakan bahwa UCT Program *Dibao* mampu memberikan pendapatan yang cukup bagi keluarga miskin. Akan tetapi, secara substansial program tersebut tidak menurunkan tingkat kemiskinan karena kesalahan dalam penargetan sasaran penerima program. Sedangkan mengenai Program Sembako, Dewi *et al.* (2022) telah menemukan adanya penghambat keberhasilan program dalam menurunkan kemiskinan. Dalam hal ini, penduduk miskin yang seharusnya bisa keluar dari kemiskinan karena menerima Program Sembako, kenyataannya malah tidak menerima Program Sembako. Ketidaktepatan sasaran Program Sembako ini tercermin dari *exclusion error* yang tinggi (*exclusion error rate* mencapai 71,04% pada tahun 2020).

Penyaluran Bantuan Sosial dalam Program Tahap I kemungkinan mengalami ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan SEPBS 2021, TNP2K (2022) menunjukkan bahwa penduduk desil 1 di lokasi Program yang menerima bantuan sosial Program Tahap I hanya 9,29%. Padahal, banyak penduduk yang lebih sejahtera (penduduk di desil 2 – desil 10) masih menerima bantuan sosial Program Tahap I. Sebaran penerima bantuan sosial Program Tahap I ini ditunjukkan dalam gambar 3.



**Gambar 3.** Persentase Sebaran Penerima Bantuan Program Tahap I  
Sumber: TNP2K (2022)

Relatif kecilnya penerima bantuan sosial pada desil 1 mengindikasikan bahwa tidak semua penduduk miskin ekstrem telah menerima Program Tahap I. Dengan rata-rata tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di kabupaten lokasi Program Tahap I sebesar 6,40%, seluruh penduduk miskin ekstrem berada di desil 1 (10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah). Apabila semua penduduk pada desil 1 ini mendapat tambahan (*top up*) BLT Desa dan Program Sembako, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem berpotensi terjadi. Akan tetapi, karena hanya sebagian kecil penduduk pada desil 1 yang mendapatkan bantuan sosial, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem tidak terjadi sebagaimana teori perubahan yang diharapkan.

Dalam penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, terdapat dua skema bantuan, yaitu bantuan diberikan kepada seluruh penduduk (*universal coverage*) dan bantuan hanya diberikan kepada penduduk miskin. Apabila kondisi anggaran terbatas, yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan hanya kepada penduduk miskin. Dalam hal ini, efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan target sasaran/*targeting*

penduduk miskin (Coady *et al.*, 2014).

*Targeting* yang berkualitas memiliki *error* yang kecil, baik *inclusion error*, maupun *exclusion error*. Makin kecil *error* dalam *targeting*, makin efektif peran bantuan sosial dalam penurunan kemiskinan.

Selain kecilnya *error*, efektivitas bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan juga dipengaruhi oleh *poverty gap* atau selisih konsumsi penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Dalam skema optimalnya, jika bantuan sosial hanya diberikan kepada penduduk miskin dengan nilai bantuan sebesar *poverty gap* setiap individu, *ceteris paribus*, seluruh individu miskin tersebut akan keluar dari

Ketidakefektifan Program Tahap I karena bantuan sosial yang lebih kecil dari *poverty gap* kemiskinan ekstrem ini kemungkinan juga terjadi, namun tidak tersedia datanya untuk dianalisis. Akan tetapi, dengan melihat perbedaan *poverty gap* kemiskinan makro, hal yang serupa kemungkinan terjadi di kemiskinan ekstrem. Dalam konteks kemiskinan makro, misalnya, diestimasi *poverty gap* tahun 2021 untuk Kabupaten Probolinggo sebesar Rp77.818, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp110.236. Padahal, 2 kabupaten yang menjadi contoh tersebut tersebut merupakan penerima Program Tahap I

## E. Kesimpulan

Sebelum dilaksanakan Program Tahap I, kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mengalami penurunan. Akan tetapi, *trend* penurunannya makin lambat. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sehingga dapat mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Tahap I pada akhir 2021.

Program ini merupakan intervensi baru berupa tambahan (*top up*) BLT Desa dan Program Sembako selama 3 bulan

kemiskinan (Coady *et al.*, 2014). Skema optimal inilah yang menjadi asumsi dalam penelitian ini.

Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin, nilainya tidak memperhitungkan *poverty gap* sehingga dibuat seragam untuk semua penduduk miskin. Akibatnya, hanya sebagian penduduk miskin yang bisa keluar dari kemiskinan, yaitu penduduk miskin dengan *poverty gap* lebih kecil dari nilai bantuan. Untuk penduduk miskin yang *poverty gap*nya lebih besar dari nilai bantuan yang diterima, *ceteris paribus*, tetap akan bertahan dalam kemiskinannya walaupun mendapat bantuan sosial.

(Oktober-Desember 2021). Program Tahap I dilaksanakan di 35 kabupaten yang tersebar pada 7 provinsi prioritas.

Walaupun Program Tahap I bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi program, hasil evaluasi dampak kebijakan menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak tercapai. Penurunan kemiskinan ekstrem di lokasi Program Tahap I tidak lebih cepat dibanding *counterfactualnya*.

Tidak efektifnya Program Tahap I dalam mewujudkan tujuan tersebut kemungkinan disebabkan oleh penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tambahan (*top up*) BLT Desa dan Program Sembako yang tidak tepat sasaran. Tidak semua penduduk miskin ekstrem menerima bantuan sosial. Padahal, bantuan yang sama diterima oleh banyak penduduk yang tidak berstatus miskin ekstrem. Selain itu, tidak efektifnya Program Tahap I kemungkinan juga disebabkan nilai bantuan sosial yang diterima sebagian penduduk miskin ekstrem lebih rendah daripada *poverty gap*nya.

Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak Program

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara lebih komprehensif, meliputi Program Tahap I (2021), Program Tahap II (2022), dan Program Tahap III (2023-2024).
2. Menyediakan data sasaran distribusi bantuan sosial yang akurat. Data seperti ini hanya memiliki *inclusion* dan *exclusion error* yang relatif kecil. Selain itu, individu dalam data sasaran harus bisa diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
  3. Memberikan bantuan sosial dengan nilai bantuan sosial yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan *poverty gap*. Apabila tidak bisa memberikan bantuan sosial sesuai *poverty gap* setiap individu, sekurangnya bantuan sosial diberikan berdasarkan rata-rata *poverty gap* di satu wilayah kabupaten/kota.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Angrist, J. D., dan J. S. Pischke. (2015). *The Path from Cause to Effect: Mastering Metrics*. Princenton University Press.
- Bush, S. B. (2015). Poverty dalam Gibbons, M. T. (Editor) (2015). *The Encyclopedia of Political Thought Edisi Pertama*. John Wiley and Sons.
- Coady, D., M. E. Grosh, dan J. Hoddinott. (2004). Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. Washington, D.C.: The World bank and IFPRI
- Gertler, P. J., S. Martinez, P. Premand, L. B. Rawlings, dan C. M. Vermeersch. (2016). *Impact Evaluation in Practice - Second Edition*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Langbein, L. dan C. L. Felbinger. (2006). *Public Program Evaluation, A Statistical Guide*. New York: M. E. Sharpe. Inc.
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Jurnal

- Agrawal, P. (2007). Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan. *Asian Development Review*, 24(02), 90-115.
- Agustina, P. W., K. Asmara, dan A. Bachtiar. (2023). Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah*

- Wahana Pendidikan*, 9(21), 559-567.
- Chambers, R. (2006). What is Poverty? Who Asks? Who Answer. *Poverty in Focus*, Desember, 1-4.
- Dewi, M. M., S. Sukamdi, dan E. H. Pangaribowo. (2022). The Effectiveness of Targeting Food Assistance Program in Indonesia. *Southeast Asian Journal of Economics*, 10(1), 37-72.
- Golan, J., T. Sicular, dan N. Umapathi. (2017). Unconditional Cash Transfers in China: Who Benefits from the Rural Minimum Living Standard Guarantee (Dibao) Program? *World Development*, 93, 316-336.
- Habimana, D., J. Haughton, J. Nkurunziza, dan D. M. A. Haughton. (2021). Measuring the Impact of Unconditional Cash Transfers on Consumption and Poverty in Rwanda. *World Development Perspectives*, 23, 100341.
- Harahap, M. (2023). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(2), 85-94.
- Jolliffe, D., C. Gundersen, L. Tiehen, dan J. Winicki. (2005). Food Stamps Benefit and Child Poverty. *American Journal of Agricultural Economics*, 87 (3), Agustus, 569-581.
- Kwon, H dan W. Kim. (2015). The Evolution of Cash Transfer in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation. *Asia and Pacific Policy Studies*, 2 (2), 425-440.
- Rahmawati, D., dan A. F. Sebayang. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 93-100.
- Sasmal, R., dan J. Sasmal. (2016). Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 604-618.
- Varlitya, C. R., R. Masbar, A. Jamal, dan M. Nasir. (2019). Do Fiscal Decentralization and Human Development Index Affect Poverty in Indonesia? In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 563-573). Atlantis Press.
- Widjaja, M. (2012). An Economic and Social Review on Indonesia's Direct Cash Transfer Program to Poor Families in 2005. *Economics and Finance in Indonesia*, 60(2), 197-212.
- Wisnutama, A., J. Pramono, dan A. T. Haryanto. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2).
- Yusuf, A. A. (2018). The Direct and Indirect Effect of Cash Transfers: The Case of Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 793-807.

### **Dokumen**

- Adji, A., P. Asmanto, D. Nugroho, A. Sadikin, dan N. B. Handayani. (2022a). Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024. *Ringkasan Kebijakan*. Jakarta: TNP2K.
- Adji, A., P. Asmanto, D. Nugroho, A. Sadikin, A. Chamami, Nursyahrizal,

- W. S. Nugroho, Z. A. Syarifah, M. Ahmad, E. Fadhillah, Sutikno, N. B. Handayani, E. Rahmawati, L. Widyastuti, A. Tohari. (2022b). *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem (P3KE)*. *Softcopy*. Jakarta: TNP2K.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: BPS.
- Banerjee, A., R. Hanna, B. A. Olken, E. Satriawan, dan S. Sumarto. (2021). *Food vs. Food Stamps: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia*. *Working Paper w28641*. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Hastuti, S. Sumarto, S. Usman, B. Sulaksono, S. Budiyanti, W. D. Widyanti, R. Fillaili, D. Suryadarma, M. Rosfadhila, H. Sadaly, S. Erlita. (2006). *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta*. *Laporan Penelitian*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (PMK 222/2020)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. (Permensos 5/2021)
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017)
- Tiehen, L., D. Jolliffe, dan T. Smeeding. (2013). *The Effect of SNAP on Poverty*. *IRP Discussion Paper No. 1415-13*. Wisconsin: Institute for Research on Poverty University of Wisconsin.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2022). *Menuju Kemiskinan Ekstrem 0% Tahun 2024*. *Flyer*.
- Wheaton, L., dan Tran, V. (2018). *The Antipoverty Effects of the Supplemental Nutrition Assistance Program*. *Research Report*. Washington, DC: Urban Institute.
- United Nations (UN). (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. *A/Res/70/1*. New York: UN

## Website

Hasell, J. (2022). *From \$1,9 to \$2,15 a Day: The Updated International Poverty Line*. <https://ourworldindata.org/from-1-90-to-2-15-a-day-the-updated-international-poverty-line>. 25 Januari 2023. (11.45).

<https://www.britannica.com/topic/poverty>. 25 Januari 2023. (9.50)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemis-kinan>. 25 Januari 2023. (9.50)

<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran>.

20 Maret 2023. (8.00).

Roser, M. (2021). *Extreme Poverty: How Far Have We Come, How Far do We Still Have to Go?* <https://ourworldindata.org/extreme-poverty-in-brief>. 25 Januari 2023. (11.45).

UN Data. (2023). *Poverty Head Count Ratio at \$1.9 a Day (2011 PPP) (% of Population)*. [https://data.un.org/Data.aspx?q=poverty&d=WDI&f=Indicator\\_Code%3aSI.POV.DDAY](https://data.un.org/Data.aspx?q=poverty&d=WDI&f=Indicator_Code%3aSI.POV.DDAY). 31 Juli 2023. (7:27)